

RINGKASAN

DEWI ASDAR PURWANINGSIH, Program Studi Ilmu Administrasi-Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, Dampak Moratorium Penempatan Tenaga kerja Indonesia (TKI) Pekerja Sektor Domestik Di Kabupaten Cilacap. Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. Slamet Rosyadi, M.Si., anggota: Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang terjadi dari penerapan kebijakan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pekerja sektor domestik terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Cilacap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak kebijakan moratorium penempatan tenaga kerja indonesia (TKI) pekerja sektor domestik yang meliputi 1) dampak terhadap tujuan kebijakan pengiriman TKI, 2) dampak terhadap tindakan-tindakan pelaku kebijakan, 3) dampak kebijakan (policy impact outcomes dan policy output). Analisis data menggunakan teknik model Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik di Kabupaten Cilacap memberikan dampak pada peningkatan sistem penempatan dan perlindungan terhadap calon TKI dan para TKI sejak didalam negeri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat asal TKI. Untuk memberikan perlindungan TKI, pemerintah daerah dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI yang bertujuan untuk untuk memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi, memberikan jaminan dan perlindungan kepada calon TKI atau TKI sejak didalam negeri, di negara tujuan sampai kembali ke tempat asal TKI serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya. 2) Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI terus melakukan perbaikan sistem penempatan dan perlindungan TKI. Kebijakan moratorium diberlakukan sebagai terobosan dalam upaya negosiasi dengan pemerintah negara tujuan agar terjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah negara tujuan sehingga para TKI akan mendapatkan perlindungan dan hak-haknya yang lebih sebagai tenaga kerja. 3) Tujuan kebijakan moratorium pengiriman tenaga kerja sektor domestik di Kabupaten Cilacap dipahami oleh perusahaan penyalur penyalur TKI dan calon TKI yaitu untuk memberikan perlindungan dan memperbaiki sistem penempatan TKI yang bekerja di luar negeri, sehingga nasib para TKI di luar negeri menjadi lebih baik. 4) Pengiriman TKI sektor domestik pasca moratorium tujuan Arab Saudi hingga saat ini masih dihentikan total, tidak ada aktivitas rekrutmen. Sedangkan pengiriman tujuan TKI tujuan Malaysia sudah mulai dibuka kembali oleh pemerintah setelah pemerintah malaysia bersedia

menandatangani MoU. Sistem rekrutmen yang diterapkan sesuai dengan syarat masing-masing negara tujuan penempatan. Negara tujuan timur tengah masih menerapkan sistem Quota Visa sedangkan negara-negara di Asia Pasifik mulai menerapkan standar tertentu seperti pendidikan minimal dan ketrampilan sesuai dengan bidang kerjanya. Sistem penempatan TKI yang diterapkan masih kurang memberikan perlindungan sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi para TKI karena akan mendapatkan diskriminasi dan kekerasan dari majikan dan oknum yang mendukung majikan atau mendapatkan ancaman gaji tidak dibayarkan. Terkait dengan upaya perlindungan terhadap hak para TKI, pemerintah terus berupaya melakukan negosiasi agar negara tujuan penempatan TKI bersedia memenuhi MoU yang diajukan Pemerintah Indonesia. Seiring dengan upaya negosiasi dengan otoritas negara tujuan pengiriman TKI tersebut, pemerintah juga perlu melakukan pembenahan internal agar fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Indonesia dapat dilaksanakan secara akuntabel.

Dampak Kebijakan (policy impact outcomes dan policy output) 1)

Kebijakan moratorium memberikan dampak positif berupa, peningkatan kesiapan calon TKI baik dari segi mental maupun ketrampilan, meningkatkan nilai jual atau daya saing TKI dengan tenaga kerja asal negara lain, meningkatkan perlindungan dan penataan sistem kerja yang lebih baik sehingga para TKI terhindar dari tindakan diskriminasi dan praktek perbudakan yang dilakukan oleh majikan maupun keluarga majikan yang lain. 2) Kebijakan moratorium pengiriman TKI sektor domestik ke Arab Saudi dan Malaysia bersifat absolut, semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengiriman TKI ke negara tersebut harus mematuhi sampai dengan dibukanya kembali kebijakan pengiriman TKI. Dari kebijakan tersebut diketahui PPTKIS sebagai perusahaan penyalur TKI dengan tujuan Arab Saudi dan Malaysia merupakan pihak yang paling terkena dampak. Dampak terhadap sosial ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat disebabkan pendapatan yang diperoleh warga yang menjadi TKI diluar negeri belum dikelola dengan baik, seperti digunakan sebagai modal usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan keluarga setelah tidak lagi bekerja menjadi TKI di luar negeri. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan SDM sehingga belum mampu mengembangkan kreatifitas untuk membuka usaha atau memanfaatkan pengalaman di luar negeri untuk mencari pekerjaan di dalam negeri.

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Moratorium, Pekerja Sektor Domestik, Tenaga Kerja Indonesia.

SUMMARY

DEWIASDAR PURWANINGSIH, Administrative Science Program-Post Graduate Program, General Soedirman University, The Impact of Moratorium Placement of Indonesian Worker (TKI) Domestic Sector Workers In Cilacap Regency. Supervising Commission, Chairman: Dr.Slamet Rosyadi, M.Sc., Member: Dr.Tyas Retno Wulan, M.Si

The purpose of this study is to investigate and to analyze the effects that occur from the application of the moratorium placement of Indonesian Workers (TKI) domestic sector workers against the Protection of Indonesian Workers in Cilacap district. The type of research used in this study is qualitative research. The focus of this research is the impact of moratorium placement of Indonesian Workers (TKI) domestic sector workers that includes 1) the policy impact on the delivery of migrant workers, 2) the impact on the actions of policy actors, 3) the impact of the policy (policy impact outcomes and policy output). Analysis of the data is using the technique of Miles and Huberman models that activity in qualitative data analysis is done interactively and continuously carried through to completion.

The results showed that 1) The moratorium policy on sending workers in the domestic sector Cilacap Regency impact on improving the system of placement and protection of migrant workers and the workers candidates from within the country, in the country of destination to return to the place of migrant workers' origin. To provide protection of migrant workers, local government and the Department of Social Welfare, Manpower and Transmigration have issued Cilacap district of Cilacap Regency Regulation No. 7 of 2014 on the Placement and Protection of Migrant Workers which aims to empower and leverage for optimal and humane workers, provide guarantees and protection to prospective migrants or migrants from within the country, in the country of destination to return home and to improve the welfare of migrant workers and their families. 2) The Government through the Ministry of Manpower and Transmigration and BNP2TKI always improved the system of placement and protection for migrant workers. Moratorium policy was imposed as a break through in efforts to negotiate with destination country for an agreement between the Government of Indonesia and the Government of the destination country so that the workers will get protected and get their rights as a labor. 3) The purpose of moratorium policy on sending domestic sector workers in Cilacap Regency understood by supplier company of workers and prospective workers is to provide protection and to improve the system of placement of workers who work abroad, for the better fate of migrant workers. 4) The workers' delivery of domestic sector after the moratorium destination onto Saudi Arabia was totally stopped, no recruitment activity. While the purpose of sending migrant to Malaysia has begun to open again by the Malaysian government after government is willing to sign the MoU. Recruitment system is implemented in accordance with the terms of each country of destination placement. Countries of middle east are still applying Visa Quota system

while countries in the Asia-Pacific region are applying certain standards such as minimum education and skills according to their field of work. The placement system for TKI which was implemented still do not provide protection so that could potentially be a threat to the workers because it will get discrimination and violence from employers and unscrupulous employers who support or do not get paid a salary threats. Related to the protection of the rights of migrant workers, the government continues to negotiate so that purpose country of the placement of workers willing to meet MoU proposed by the Indonesian government. A long with efforts to negotiate with the authorities of the country of delivery workers, the governmental so needs to make internal improvements so that the functions of supervision and guidance of government carried out by the Indonesian Embassy can be carried accountable.

The policy impacts are (impact policy outcomes and policy output) :1) The moratorium gives positive impact, increase readiness prospective workers both mentally and skills, improve the competitiveness of the sale value or workers with workers from other countries, increasing protection and structuring of work better so that the workers avoid discrimination and slavery committed by the employer or another employer's family. 2) Policies moratorium on sending workers domestic sector to Saudi Arabia and Malaysia are to absolute, all parties involved in the activities of sending workers into the country mustad here to the policy of sending workers reopening. From those policies known as a supplier company PPTKIS workers with the objective of Saudi Arabia and Malaysia are the most affected. Socio-e conomic impact on the community felt by residents is because the income of the workers has not been managed properly, such as it is usedas the venture capital which can be a source of family income after no longer work as a migrant. This happens due to lack of human resources that have not be enable to develop the creativity to open a business or take advantage of the experience a broad to seek employment in the country.

Keywords: Impact of Policies, Moratorium, Domestic Workers, Indonesian Labor.

PRAKATA

Penuh rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis yang berjudul “Dampak Moratorium Penempatan Tenaga kerja Indonesia (TKI) Pekerja Sektor Domestik Di Kabupaten Cilacap.” dapat diselesaikan dengan baik guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penelitian ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan arahan dari berbagai pihak, penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Dr. Slamet Rosyadi, M.Si., dan Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si selaku dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran telah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Penelaah Tesis, Dr. Denok Kurniasih, M.Si dan Dr. Muslich Faozanudin, M.Si., yang telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati pula penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberi bantuan, bimbingan, dan dorongan semangat sehingga penulisan dan penyusunan tesis ini bisa terselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis juga menghaturkan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh jajaran Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cilacap yang telah memfasilitasi penulis selama proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan di MAP Unsoed angkatan 18 yang saling memberikan semangat dan kerja sama dalam menjalani proses pendidikan di MAP dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari semua pihak, penulisan tesis ini tentu tidak dapat diselesaikan dan penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun agar tercapai kesempurnaan materi. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penelitian selanjutnya.

Purwokerto, Oktober 2014

DEWI ASDAR PURWANINGSIH,

